

ABSTRAK

Qolbi, Nida 2012 “ The Importance Competency Procurement Official in Bangkalan regency to Implementation Procurement Procedures by The Presidential Regulation No. 54 of 2010”. The purpose of this research just to know implementation Presidential regulation No 54 of 2010 and conformability competency procurement’s officer with Presidential regulation No. 54 of 2010. Informans in this research is a procurement’s officer in Bangkalan regency. Data collected from direct interviews with informants and analyzed with phenomenology. The results from this study have indicated that procurement’s officials in Bangkalan regency has already implemented presidential regulation No. 54 of 2010, but not as a whole. Because funding of limited, less of necessary administration and unavailability of a special office to the procurement in Bangkalan regency. The related about competency has to be procurement’s official indication that the competency has to be procurement’s official in Bangkalan’s regency relatively of low. This is evidenced from the realization of procurement Bangkalan regency both physical and non physical.

Keywords: Procurement, Presidential Regulation No 54 of 2010, The Procurement Official, Implementation and Competence

ABSTRAK

Qolbi,Nida 2012 “Pentingnya Kompetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kabupaten Bangkalan Dalam Melaksanakan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perpres 54 Tahun 2010”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengimplementasian perpres 54 tahun 2010 dan kesesuaian kompetensi pejabat pengadaan barang/jasa menurut perpres 54 tahun 2010. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan dari wawancara langsung dengan para informan dan dianalisa dengan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat pengadaan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan sudah mengimplementasikan Perpres 54 tahun 2010, namun belum secara keseluruhan. dikarenakan keterbatasan dana, kelengkapan administrasi yang masih kurang, dan belum tersedianya kantor khusus pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat pengadaan menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki Pejabat Pengadaan/ULP di Kabupaten Bangkalan masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bangkalan baik fisik maupun non fisik.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.2.1 Batasan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	8
2.1.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8
2.1.2 Pengertian Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	11
2.2 Etika dan Norma Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15
2.3 Peningkatan Profesionalisme	16
2.4 Pembentukan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Larangan	19
2.4.1 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	21
2.4.2 Syarat, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengadaan	39
2.4.3 Pemberian Referensi harga	43
2.4.4 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri	44
2.5 Penelitian Sebelumnya	46
2.6 Kerangka Berfikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49

3.2 Metode Pendekatan	50
3.3 Desain Penelitian	51
3.3.1 Implementasi Perpres 54 tahun 2010	52
3.3.2 Unit analisis kompetensi pejabat pengadaan	52
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	54
3.5.1 Observasi	54
3.5.2 Wawancara	54
3.5.4 Rekaman	55
3.5.5 Dokumentasi	55
3.6 Informan dan Kriteria Informan	56
3.7 Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Data	57
3.8 Tehnik Analisis Data	58
3.9 Alat Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	61
4.2 Informan pertama	63
4.3 Informan Kedua (Anggota ULP)	64

BAB V PEMBAHASAN	65
5.1 Implementasi Perpres 54 Tahun 2010	67
5.2 Kompetensi dan Implikasinya	71
5.3 Pemahaman ULP/Panitia Pejabat Pengadaan	71
5.4 Pemahaman Pejabat Pengadaan terhadap Prinsip Dasar Pengadaaan	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran dan Implikasi	87
6.3 Rekomendasi dan Keterbatasan	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Nama Lain dan Istilah Asing
2. Lampiran II : Notulensi atau hasil wawancara
3. Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian
4. Lampiran III : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I
5. Lampiran IV : Hasil Survei Lapangan
6. Lampiran V : Laporan realisasi Anggaran Tahun 2004,2011
7. Lampiran VI : SK Bupati Bangkalan No. 188.45/23/Kpst/443.013/2011
“Penunjukan PPK”
8. Lampiran VII : SK Bupati Bangkalan No. 188.45/1/Kpst/443.013/2011 “
Penunjukan ULP”